

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ketidaksetaraan gender di Indonesia dalam berbagai bentuk masih terjadi, baik dalam pendidikan, pendapatan, dan posisi pada kesempatan kerja. Pemerintah melaporkan perempuan Indonesia dalam berbagai aspek masih mengalami ketidaksetaraan (Rajagukguk, 2010). Pada tahun 2018 badan pusat statistik mencatat bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen hanya 22,00% dan yang bekerja sebagai tenaga manager, profesional, administrator atau teknisi 42,368%.

Perempuan pada zaman dahulu tentu masih sangat kesulitan mendapatkan haknya untuk bekerja karena terbelenggu oleh budaya yang begitu melekat pada masyarakat. Namun seiring dengan besarnya gerakan emansipasi, perempuan yang bekerja kini terus meningkat.

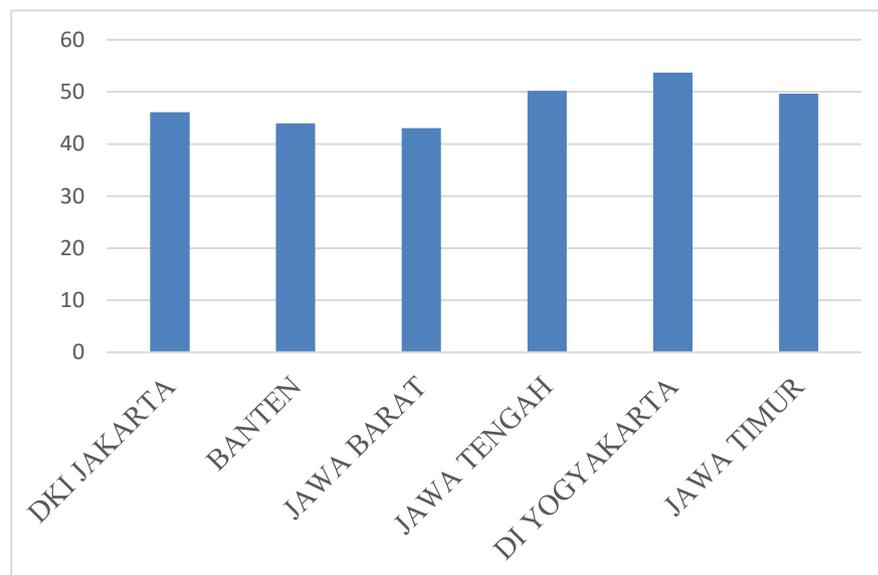
Mengambil sosok tenaga perempuan untuk penelitian ini karena apabila dilihat dari masalah tenaga kerja dari sisi gender perusahaan lebih mengutamakan laki-laki untuk dipekerjakan dari pada perempuan karena terikatnya oleh beberapa aturan pelaksanaannya yang tercantum dalam Peraturan :

1. Menteri tenaga kerja nomor 8 per-04/men/1989 tentang syarat-syarat kerja malam dan tata cara mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari.
2. Dalam Pasal 27 dan Pasal 33 tentang persamaan hak perempuan untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang layak.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, keduanya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja perempuan.
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Hak pekerja perempuan tersebut antara lain: perlindungan jam kerja, perlindungan dalam masa haid (cuti haid), perlindungan selama hamil dan melahirkan, termasuk ketika pekerja perempuan mengalami keguguran (cuti hamil dan melahirkan), pemberian lokasi menyusui (hak menyusui dan/atau pemerah ASI), hak kompetensi kerja, hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan. Jaminan hak tersebut sejalan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja perempuan yang terdapat dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan beberapa konvensi lainnya.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2020 di Indonesia perempuan yang menjadi tenaga profesional paling banyak berada pada Provinsi Sumatera Barat sebesar 58,97%. Padahal di Jawa Barat begitu banyak peluang peluang kerja yang tersedia, beragam macam sentral, melimpahnya pusat pengembangan industri, pusat perdagangan, pusat pendidikan, bahkan pusat pemerintahan, namun realitanya perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional di Jawa Barat pada tahun 2020 hanya sebesar 43,02% selisih 15,95% dengan Sumatera Barat yang menduduki persentase tenaga profesional perempuan paling tinggi di Indonesia. Pada provinsi

yang ada di Pulau Jawa, Jawa Barat masih menduduki persentase paling rendah diantara yang lainnya, paling tinggi berada pada provinsi DI Yogyakarta sebesar 53,69%, kedua disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 50,2% dan 49,65% kemudian DKI Jakarta sebesar 46,1% dan Banten sebesar 43,97%. Perbedaan persentase tersebut terjadi karena budaya yang melekat pada setiap provinsi yang ada di Indonesia berbeda. Data perempuan sebagai tenaga profesional provinsi yang ada di Pulau Jawa pada tahun 2020 diilustrasikan pada gambar 1.1

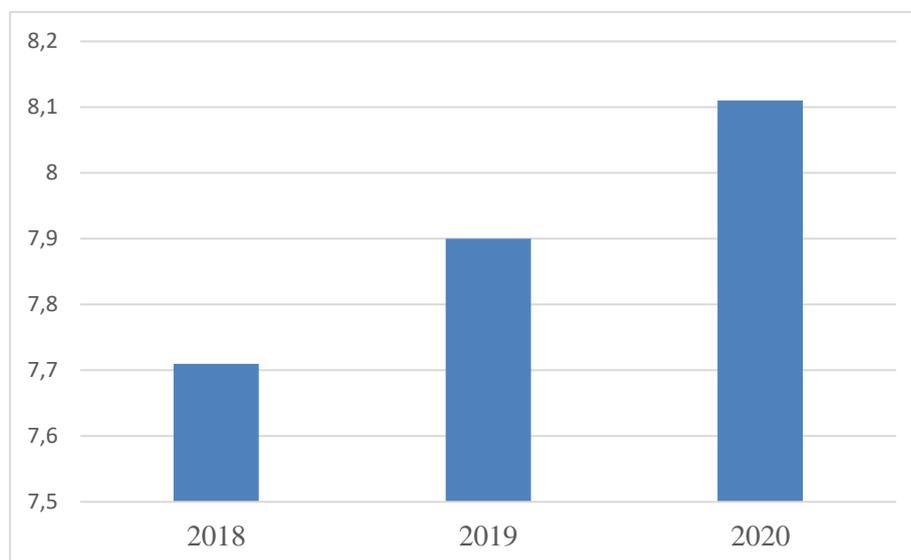


Gambar 1.1 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Pada Provinsi Pulau Jawa Tahun 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (dalam satuan %)

Tingkat pendidikan perempuan merupakan hal yang dapat menjadikan seorang perempuan menentukan posisi dalam bekerja. Menurut Simajuntak (1985) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka nilai waktunya semakin berharga, maka cenderung mengisi waktu senggangnya adalah untuk bekerja.

Data rata-rata lama sekolah perempuan Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020 diilustrasikan pada gambar 1.2



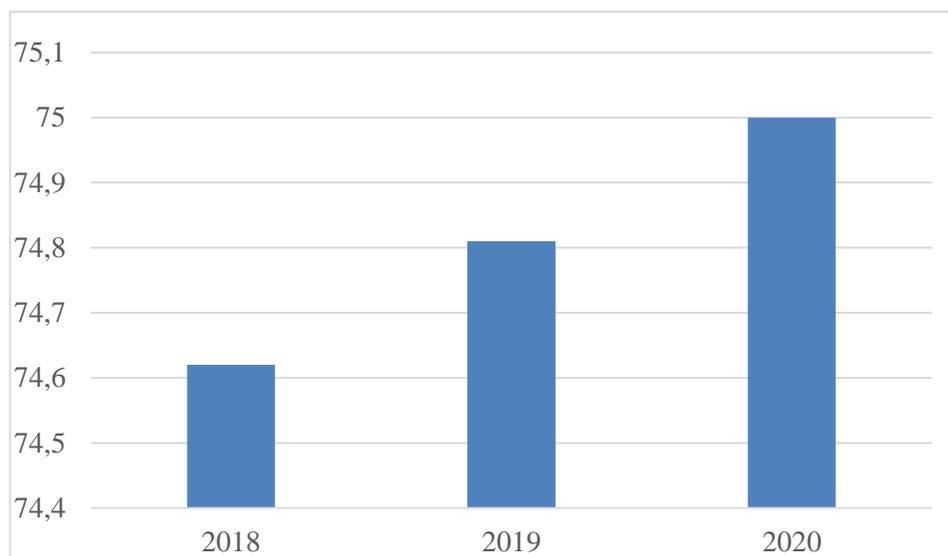
Gambar 1.2 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan di Jawa Barat tahun 2018-2020

Sumber : BPS Jawa Barat (Dalam satuan tahun)

Pada gambar 1.2 rata-rata lama sekolah perempuan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada 2018 selama 7,71 tahun, pada 2019 selama 7,9 tahun dan pada 2020 selama 8,11 tahun. Menurut Rajagukguk (2015) selain akses pada pekerjaan dan pendidikan, peningkatan kesehatan perempuan juga dapat memperkuat posisi mereka dalam pembangunan berkelanjutan untuk membantu keberhasilan pembangunan, apabila perempuan memiliki jiwa yang sehat akan lebih mampu ikut berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan ekonomi. Bappenas (2017) mengungkapkan bahwa perhatian terhadap kesehatan reproduksi perempuan sangat diperlukan, pada ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun, akses mendapatkan layanan kesehatan dasar sangat sulit, hal ini yang dapat meningkatkan kerentanan resiko pertumbuhan janin/bayi mengalami stunting. Dengan hal tersebut

angka harapan hidup perempuan menjadi perhatian terhadap perempuan supaya dapat berkontribusi untuk pembangunan perekonomian.

Menurut Farqi (2020) semakin tingginya angka harapan hidup perempuan akan meningkatkan pula kesejahteraan terutama kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat, dengan meningkatnya tingkat kesehatan yang dirasakan perempuan akan lebih produktif dan dapat bersaing dalam menduduki posisi tenaga kerja pada sektor formal. Data harapan hidup perempuan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020 diilustrasikan pada gambar 1.3



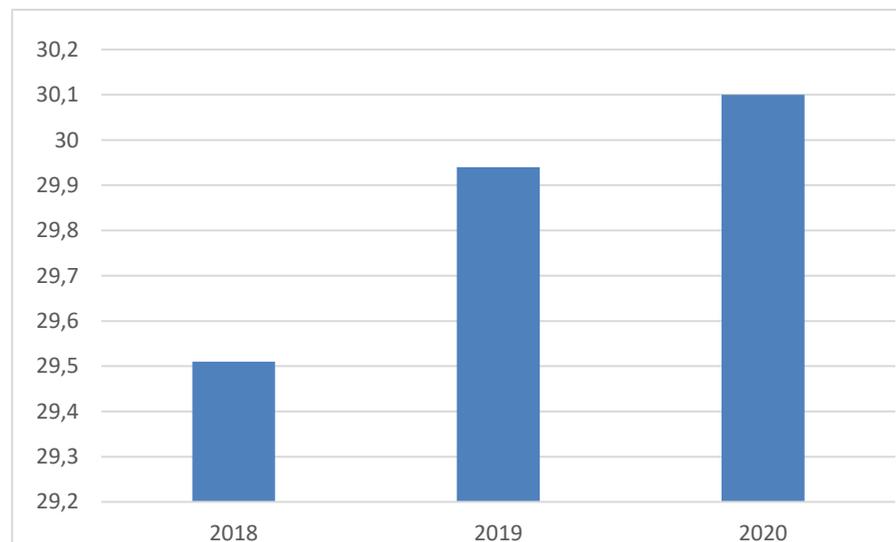
Gambar 1.3 Angka Harapan hidup Perempuan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (Dalam satuan tahun)

Pada gambar 1.3 angka harapan hidup perempuan di Jawa Barat pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada 2018 selama 74,62 tahun, pada 2019 selama 74,81 tahun dan pada 2020 selama 75 tahun. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk Jawa Barat yang berjenis kelamin perempuan memasuki usia produktif mencapai 13.925.842 juta jiwa. Jumlah usia

produktif yang banyak merupakan suatu peluang besar bagi Jawa Barat untuk membantu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dengan sumber daya manusia yang begitu melimpah.

Berdasarkan data Susenas 2020 menunjukkan bahwa di kelompok usia dewasa (18 tahun ke atas), perempuan lebih mendominasi, yakni 50,17%. Terkait hal tersebut perempuan harus mampu meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan. Data sumbangan pendapatan perempuan pada provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020 diilustrasikan pada gambar 1.4

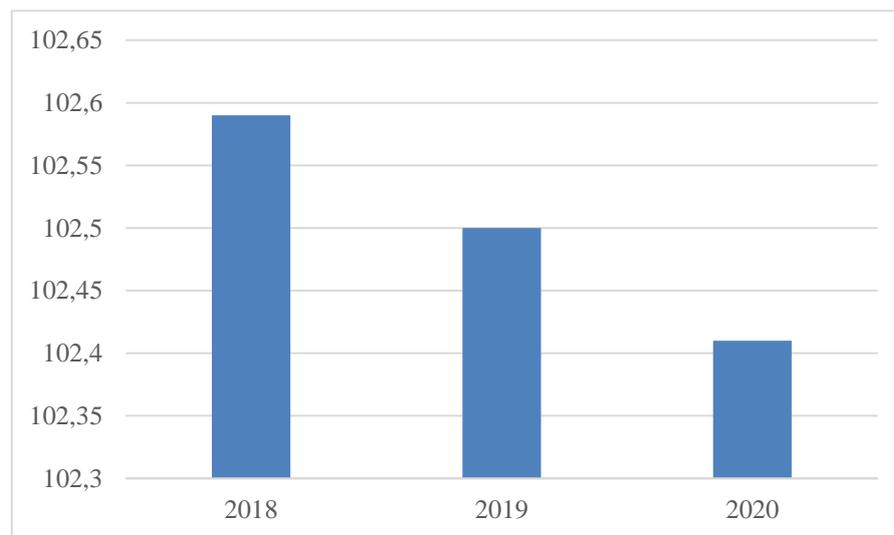


Gambar 1.4 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (Dalam satuan %)

Pada gambar 1.4 sumbangan pendapatan perempuan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar 29,51%, pada tahun 2019 sebesar 29,94 %, dan pada tahun 2020 sebesar 30,1%. Dari tahun 2018-2020 tenaga kerja perempuan masih memberikan peningkatan sumbangan pendapatan terhadap kontribusi pada keluarga mereka.

Menjadi sebuah tantangan bagi kaum wanita dalam menduduki posisi sebagai tenaga kerja profesional selain untuk meningkatkan kualitas diri perempuan juga harus mampu bersaing dengan laki-laki yang mempunyai banyak peluang dalam bekerja, dan budaya yang melekat pada masyarakat. Semakin tingginya rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan maka sedikit peluang wanita untuk bekerja sesuai dengan temuan Herawati (2013) bahwa tingkat produktivitas laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, apabila jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan maka besar kesempatan perempuan untuk bekerja bahkan menduduki tenaga profesional. Data rasio jenis kelamin di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020 diilustrasikan pada gambar 1.5



Gambar 1.5 Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah)

Dalam gambar 1.5 rasio jenis kelamin provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan namun hanya 2 digit dibelakang koma, pada tahun 2018 sebesar 102,59, tahun 2019 sebesar 102,5 dan pada tahun 2020 sebesar 102,41. Terkait hal tersebut maka masih banyak pesaing tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki terhadap

perempuan. Pada Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat masih terjadi perbedaan status pemerintah perempuan sebagai tenaga profesional, karena tingkat pendidikan dan angka harapan hidup di kabupaten masih rendah serta budaya patriarki terhadap perempuan untuk bekerja di kabupaten masih melekat. Menurut Altieno (2006) perempuan yang tinggal di pedesaan mereka lebih memilih untuk bekerja di sektor informal sementara perempuan yang tinggal di kota cenderung bekerja pada sektor formal.

Rajagukguk (2010), Martinez-Fernandez dan Marcus (2009), Faridi (2009), dan Nguyen (2009) mengungkapkan bahwa peningkatan rasio anak perempuan akan menurunkan perempuan sebagai tenaga profesional, karena tingkat kelahiran tinggi akan menghambat pencapaian perempuan maka para perempuan harus membagi waktu untuk mengurus anak. Sedangkan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini yaitu variabel independen rasio jenis kelamin terhadap perempuan sebagai tenaga profesional pada Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2020, dengan meningkatnya jumlah laki-laki maka akan berdampak terhadap perempuan untuk menduduki posisi tenaga profesional karena perusahaan lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan terkait dengan undang-undang yang telah dipaparkan di atas.

Kualitas seorang perempuan dilihat dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan angka harapan hidup perempuan saat lahir, dan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi menggunakan sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan kerja, dan keterlibatan perempuan dalam

mengambil keputusan menjadi tenaga manajerial, professional, administrasi dan teknisi (Pribudiarta, 2020).

Dengan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TENAGA KERJA PROFESIONAL (Studi Kasus: Tenaga Kerja Profesional Perempuan Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020)”**. Memfokuskan terhadap pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, rasio jenis kelamin dan status pemerintah perempuan terhadap perempuan sebagai tenaga profesional pada Kabupaten/Kota Jawa Barat tahun 2020.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh rata–rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio jenis kelamin secara parsial terhadap tenaga kerja profesional perempuan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020?
2. Bagaimana pengaruh rata–rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio jenis kelamin secara bersama–sama terhadap tenaga kerja profesional perempuan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio jenis kelamin terhadap tenaga kerja profesional perempuan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah perempuan, angka harapan hidup perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio jenis kelamin secara bersama-sama terhadap tenaga kerja profesional perempuan pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman, menambah wawasan, dan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah ke dalam penulisan usulan penelitian ini, dan terhadap karir yang hendak ingin dicapai.

2. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan bahan acuan untuk mahasiswa yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang tertarik untuk membahas mengenai topik yang sama.

